

MODEL EFEKTIVITAS TATA KELOLA MELALUI SKEMA STAKEHOLDER DYNAMICS DESA AGROWISATA NGLINGGO

Anjar Dwi Astono^{1*}

Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
anjar.astono@kalbis.ac.id

Sekarlita Indriani²

Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
sekarlita.indriani@kalbis.ac.id

Davis Roganda Parlindungan³

Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
davis@kalbis.ac.id

Michael Supriady Hutapea⁴

Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
2019104571@student.kalbis.ac.id

Vincent Louis Gunawan⁵

Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis
2019104385@student.kalbis.ac.id

Marcelinus Billy Ardianto⁶

Faculty of Business & Communication, Institut Teknologi dan Bisnis Kalbis,
2019104485@student.kalbis.ac.id

Diterima 28 November 2023

Disetujui 30 Desember 2023

Abstract- *Despite Nglingsgo Village's initiative in agrotourism development, challenges persist in its governance. The research's novelty lies in its examination of agrotourism through the prism of stakeholder dynamics, amalgamated with the innovation for sustainability strategy concept. Employing a qualitative approach within the constructivist paradigm, the study unravels the intricacies of issues within the tea plantation agrotourism of Nglingsgo Tourist Village, Samigaluh, Yogyakarta. Findings underscore critical success factors for effective governance, including community participation, environmental sustainability, quality services, and stakeholder management. In conclusion, a comprehensive model integrated into the Nglingsgo Tourist Village Tea Plantation Agrotourism development framework is essential, comprising phases such as preparation, development, implementation, and evaluation. This model ensures ongoing reevaluation by all*

Keywords: *Agrotourism Planning; Economy; Implementation Outcomes; Nature*

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan yang besar bagi negara. Menurut WTO pariwisata telah menyumbangkan pendapatan lebih dari US\$3.5 Triliun atau 6% dari pendapatan kotor dunia (Pakpahan 2018a). Di Indonesia hingga pada awal 2020 tercatat sejumlah wisatawan mancanegara sebesar 16.1 juta wisatawan. Hal ini berangsur-angsur meningkat dari tahun 2010 yang hanya 7 juta, lalu naik menjadi 10.4 juta pada tahun 2015 (Pakpahan 2018a). Ada beberapa spot pariwisata yang dapat dikunjungi oleh masyarakat dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa spot yang paling terkenal adalah Bali dan Yogyakarta. Di Yogyakarta sendiri, di bawah tahun 2010, para wisatawan biasanya melakukan perjalanan untuk menikmati wisata budaya, namun setelah tahun 2012 wisata di Yogyakarta berkembang dari kota dengan pariwisata budaya, menjadi kota dengan pariwisata pesona alam yang beragam, kuliner dan juga ekosistem pariwisata yang menarik untuk dikunjungi seperti Lava Tour dan beberapa ekosistem pariwisata lainnya (Rimapradesi and Surwandono 2022).

Salah satu titik wisata di wilayah Yogyakarta yang tidak berada di tengah kota melainkan pada sisi Baratnya adalah daerah Kulon Progo. Daerah Kulon Progo memiliki luas 596, 27 Km² Daerah ini menyimpan potensi wisata yang belum banyak dieksplorasi dan dijelajahi oleh wisatawan. Keunggulan dari Kulon Progo sekarang ini salah satunya karena Bandara International Yogyakarta berada di Wates, Kulon Progo. Keberadaan bandara ini memberikan akses yang lebih mudah dan dekat bagi para wisatawan untuk dapat mengeksplorasi wilayah Yogyakarta terutama di Kulon Progo. Kulon Progo memiliki kontur tanah perbukitan karst atau kapur yang membentang dari Utara ke Selatan dengan puncak tertingginya yaitu Puncak Suralaya yang berada di 1020 Mdpl (Pakpahan 2018a). Salah satu daerah di dekat dengan Puncak Suralaya adalah Desa Wisata Nglingsgo yang memiliki daya tarik berupa kebun teh seluas 136 Hektar (Tour 2020).

Kawasan wisata Kulon Progo sendiri banyak dikelola lembaga masyarakat desa bernama desa wisata. Konsep desa wisata ini sendiri cukup berkembang sejak diberlakukannya UU No. 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa diberikan kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri atau mandiri dalam pengelolaan pemerintahannya berdasarkan prakarsa dari masyarakat, hak asal-usul serta hak tradisional yang diakui dan dihormati. Dusun Nglingsgo sejak tahun 2004 ditetapkan oleh Pemda Kulon Progo sebagai desa wisata yang berbasis Community Based Tourism yang memanfaatkan komoditas pertanian dan perkebunan yang sering disebut Agrowisata (kulonprogokab.go.id 2016). Agrowisata sendiri adalah sebuah konsep pariwisata yang berbasis pemanfaatan komoditi pertanian maupun perkebunan untuk kesejahteraan masyarakat (Swastika, Sri Budhi, and Urmila Dewi 2017). Artinya dari keragaman potensi pertanian maupun perkebunan yang mereka miliki, masyarakat tidak hanya sebagai penonton dalam sebuah ekosistem pariwisata melainkan justru menjadi bagian inti yang tidak terpisahkan dari pariwisata. Agrowisata dinilai cocok dikembangkan di desa ini mengingat tanah yang subur serta cuaca atau iklim yang sesuai dengan berbagai jenis tanaman baik itu tanaman keras maupun tanaman-tanaman perkebunan atau pertanian lainnya (kulonprogokab.go.id 2016).

Sejak lima tahun kegiatan agrowisata di Desa Wisata Nglingsgo, objek wisata yang jadi andalannya berupa kebun teh belum dapat berkembang secara maksimal, sebagaimana diharapkan pada awal pengembangannya (Sebua and Rusiana 2023). Berdasarkan beberapa hasil penelitian ditemukan ada beberapa permasalahan mengenai tata kelola di desa wisata. Salah satunya kurang maksimalnya peran dari stakeholder yang memang menjadi pemain inti dalam pengelolaan agrowisata (Safitri 2022), masyarakat lokal sebagai stakeholder utama dari pariwisata masih termarginalkan dalam bisnis pariwisata, mereka memiliki pemahaman

fenomena alam dan budaya, tetapi tidak memiliki kekuatan finansial dan keahlian yang cukup untuk mengelolanya (Astono and Herwin 2021), rendahnya komitmen dan partisipasi antar stakeholder akan menyebabkan pembangunan desa wisata tidak berjalan dengan maksimal (Oktadiani 2022), komitmen setiap stakeholder tidak merata menyebabkan kolaborasi antar stakeholders terhambat bahkan menimbulkan konflik antar mereka (Fairuza 2017), minimnya perencanaan program promosi pariwisata desa wisata (Parlindungan 2021b), Faktor SDM dan masalah infrastruktur yang belum memadai dan keterbatasan dana (Janar 2023) dan faktor penghambat terkait pendidikan dan kesiapan masyarakat (Pakpahan 2018). Dari uraian hasil penelitian diatas belum ada penelitian yang secara komprehensif fokus pada tata kelola stakeholder desa wisata yang efektif dalam tata kelola agrowisata. Sehingga tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dan mengembangkan sebuah model atau kerangka kerja tata kelola stakeholder agrowisata yang berkelanjutan sebagai pedoman dalam pembangunan desa wisata.

1.2 Landasan Teori

1.2.1 Model Tata Kelola

Model tata kelola agrowisata adalah suatu konsep pengelolaan wisata yang berbasis pada kegiatan pertanian atau perkebunan yang memanfaatkan aspek keunikan dari sektor tersebut untuk menarik wisatawan. Penelitian terbaru yang diterbitkan pada tahun 2021 oleh Wayan dkk., menyebutkan bahwa model tata kelola agrowisata yang efektif harus didasarkan pada empat aspek utama, yaitu (Windia et al. 2007):

1. Keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengembangan program agrowisata. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa program yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.
2. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengurangan dampak negatif pada lingkungan.
3. Peningkatan kualitas produk dan layanan yang disediakan, dengan menyesuaikan dengan kebutuhan wisatawan dan memastikan keamanan serta kenyamanan wisatawan selama berkunjung.
4. Peningkatan aksesibilitas dan promosi yang efektif, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan pemasaran yang terintegrasi.

Adapun penjelasan dari beberapa butir di atas adalah sebagai berikut keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengembangan program agrowisata sangat penting karena dapat memastikan bahwa program tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Dengan melibatkan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan, para pengelola program agrowisata dapat memperoleh informasi penting tentang kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap program tersebut. Selain itu, keterlibatan masyarakat lokal dapat mendorong partisipasi dan dukungan mereka terhadap program, sehingga dapat meningkatkan kesuksesan program agrowisata tersebut.

Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan aspek penting dalam pengembangan program agrowisata, karena sektor pertanian dan perkebunan memiliki dampak yang signifikan pada lingkungan (Ciolac et al. 2019). Oleh karena itu, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan pengurangan dampak negatif pada lingkungan harus menjadi perhatian utama dalam pengembangan program agrowisata (Ammirato et al. 2020). Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi modern yang lebih efisien dalam penggunaan energi dan pengelolaan limbah, serta memastikan bahwa semua aktivitas agrowisata berjalan

dengan memperhatikan prinsip-prinsip konservasi dan keberlanjutan lingkungan (Maulana 2021).

Peningkatan kualitas produk dan layanan yang disediakan merupakan faktor kunci dalam menarik wisatawan. Untuk itu kegiatan agrowisata harus menawarkan produk dan layanan yang berkualitas tinggi, sesuai dengan kebutuhan dan harapan wisatawan. Selain itu, faktor keamanan dan kenyamanan wisatawan selama berkunjung juga harus menjadi perhatian utama. Para pengelola harus memastikan bahwa infrastruktur dan fasilitas yang tersedia aman dan nyaman bagi para wisatawan (Practices 2014). Selain itu akomodasi dan kuliner adalah salah satu aspek yang paling menarik bagi wisatawan (Nidar, Sutisna, and Firmansyah 2018).

Peningkatan aksesibilitas dan promosi yang efektif merupakan faktor penting dalam menarik wisatawan. Hal ini dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pemasaran yang terintegrasi, seperti penggunaan situs web dan media sosial untuk mempromosikan agrowisata dan menyediakan informasi yang lengkap dan akurat tentang program dan fasilitas yang tersedia. Selain itu, aksesibilitas yang baik juga harus menjadi perhatian, dengan menyediakan transportasi dan akses jalan yang mudah ditempuh ke lokasi agrowisata (Roth and Ochterski 2016).

1.2.2 Stakeholder Dynamics

Teori Stakeholder Dynamics mengemukakan bahwa dalam suatu organisasi atau proyek, terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan atau sering disebut stakeholder (Eden and Ackermann 2021). Interaksi antar stakeholder tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan organisasi atau proyek tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan manajemen stakeholder yang baik untuk memastikan kepentingan semua pihak dapat terpenuhi. Implementasi teori stakeholder dynamics dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, melalui identifikasi stakeholder, yaitu mengidentifikasi siapa saja pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi atau proyek. Kedua, mengelola stakeholder yaitu memastikan kepentingan semua pihak terpenuhi melalui komunikasi partisipatif dan keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan. Ketiga, mengukur pengaruh stakeholder, yaitu mengukur seberapa besar pengaruh stakeholder terhadap tingkat keberhasilan organisasi atau proyek (Freeman 2015).

Contoh implementasi teori stakeholder dynamics dapat dilihat pada penelitian yang dilakukan oleh Mesa dkk., mengenai manajemen stakeholder pada proyek pembangunan jalan tol di India. Penelitian tersebut menemukan bahwa manajemen stakeholder yang baik dapat meningkatkan dukungan masyarakat dan mengurangi risiko konflik dalam proyek pembangunan jalan tol tersebut. Selain itu, penelitian juga menunjukkan pentingnya mengidentifikasi stakeholder yang tersembunyi atau tidak terlihat, seperti masyarakat adat atau kelompok minoritas, dalam manajemen stakeholder. Dalam teori ini, penting untuk memastikan kepentingan semua pihak terpenuhi dan dilakukan dengan cara yang transparan dan partisipatif. Dengan demikian, manajemen stakeholder yang baik dapat meningkatkan keberhasilan organisasi atau proyek yang dilakukan (Blanco-Mesa, Gil-Lafuente, and Merigó 2018).

1.2.3 Agrowisata

Agroturisme atau agrowisata adalah kegiatan pariwisata yang dilakukan di wilayah yang berbasis pertanian atau perkebunan. Mohd Nazri Hassan et al. (2021) menjelaskan agrowisata merupakan bentuk alternatif dari pariwisata yang menawarkan pengalaman berbeda dengan pariwisata konvensional, dimana wisatawan dapat terlibat langsung dalam kegiatan pertanian atau perkebunan.

Agrowisata sendiri memiliki beberapa seluk beluk, yaitu sebagai berikut menawarkan pengalaman yang berbeda dari pariwisata konvensional. Wisatawan dapat belajar dan terlibat langsung dalam kegiatan pertanian atau perkebunan, seperti memetik buah atau menanam sayuran. Hal ini memberikan pengalaman yang unik dan berbeda dari pariwisata konvensional (Mansor et al. 2015). Agrowisata dapat memberikan peluang penghasilan tambahan bagi petani dengan membuka lahan pertanian atau perkebunan sebagai tempat wisata. Dengan begitu petani dapat memperoleh penghasilan tambahan dari wisatawan yang berkunjung.

Agrowisata dapat meningkatkan kesadaran lingkungan, karena wisatawan dapat melihat langsung bagaimana kegiatan pertanian atau perkebunan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan. Hal ini dapat memotivasi wisatawan untuk lebih peduli dan sadar akan pentingnya konservasi lingkungan. Disamping itu agrowisata dapat mendorong pengembangan wilayah pedesaan untuk meningkatkan perekonomian melalui sektor. Hal ini secara tidak langsung dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah pedesaan (Tanralli 2019).

Disisi lain, agrowisata juga memiliki tantangan tersendiri, seperti membutuhkan investasi yang besar dalam pengembangan infrastruktur dan fasilitas, serta membutuhkan manajemen yang baik untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan dampak lingkungan dari kegiatan agrowisata, sehingga harus dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan ramah lingkungan (Mahmoodi, Roman, and Prus 2022).

1.3 Kerangka Penelitian

Framework ini menggambarkan pendekatan secara komprehensif dalam menyusun model tata kelola stakeholder agrowisata di Desa Wisata Nglingsgo, Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo yang menjadi studi kasus dalam penelitian ini. Rujukan model tata kelola stakeholder dalam menyusun framework dari penelitian ini berdasarkan model tata kelola pengembangan agrowisata berkelanjutan di Zimbabwe yang dikembangkan oleh Baipai dkk., (Baipai et al. 2023a). Hal ini dipertimbangkan bahwa model tata kelola stakeholder tersebut sangat penting sebagai panduan bagi para stakeholder, khususnya dalam pengembangan agrowisata berkelanjutan dari perspektif negara berkembang seperti Indonesia. Model ini menggambarkan bahwa agrowisata merupakan strategi diversifikasi usaha berkelanjutan yang membutuhkan upaya kolaboratif dari berbagai pihak, seperti dari pemerintah, petani, pelaku usaha, pemilik lahan, media massa dan sebagainya.

Proses kolaborasi melalui integrasi dengan menggunakan sistem manajemen di bidang pariwisata berdasarkan faktor penentu keberhasilan (Critical Success Factors/CSF) sebagai indikator keberhasilan kinerja kompetitif organisasi usaha (Marais, Du Plessis, and Saayman 2017). Proses ini juga memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan keberlanjutan demi kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal dan pelestarian lingkungan berdasarkan pendekatan triple bottom line dalam pembangunan keberlanjutan (Elkington 1997) sebagai berikut yaitu,

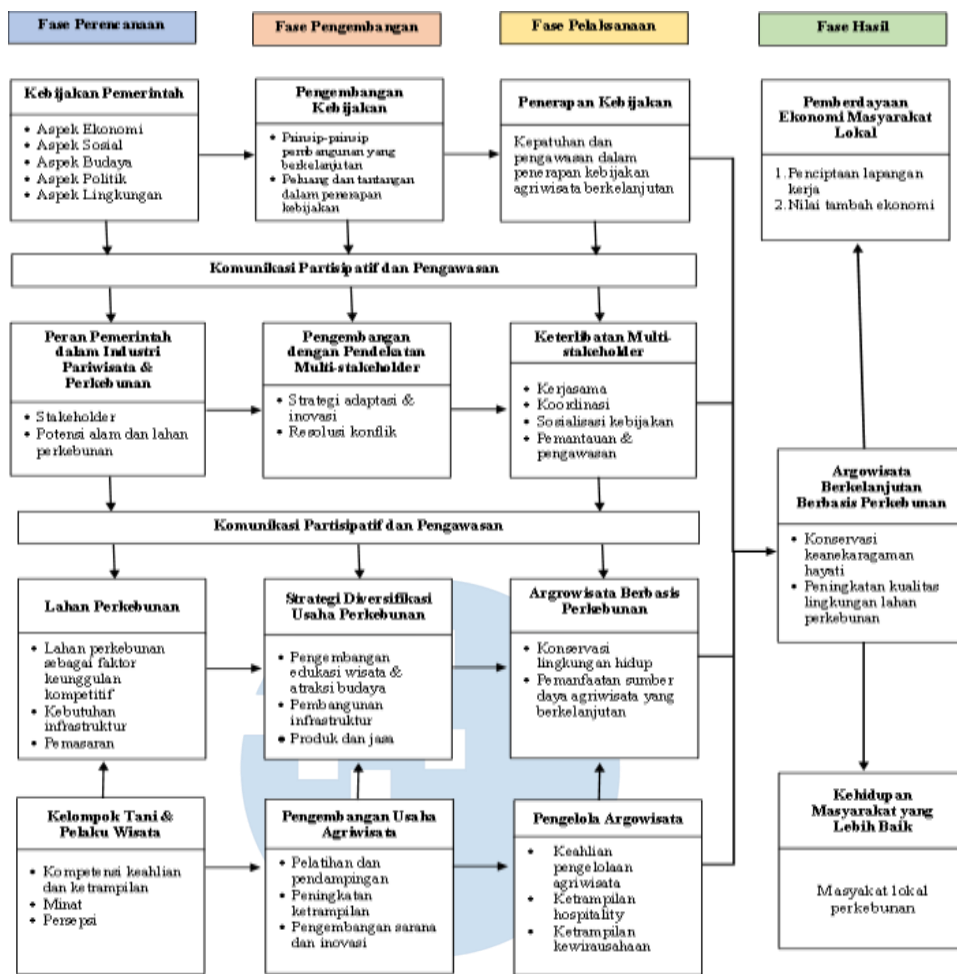
Pertama, melalui perencanaan yang matang, melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah daerah, petani, dan pelaku wisata, desa dapat mengembangkan visi yang jelas untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan. Keterlibatan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang mendukung, serta penekanan pada aspek sosial, budaya, dan lingkungan, menjadi dasar bagi kesuksesan tata kelola. Kedua, dalam tahap implementasi dalam menerapkan kebijakan secara efektif, dengan berfokus pada peran penting stakeholder dan aspek-aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Hasil akhirnya adalah pengembangan agrowisata yang berkelanjutan, yang tidak hanya menciptakan peluang ekonomi tetapi juga melestarikan lingkungan dan memajukan masyarakat setempat. Program keberlanjutan sering disebut juga dengan konsep Triple Bottom Line (TBL) karena mengembangkan konsep

tersebut diintegrasikan dengan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial (Pranicevic and Peterlin 2015). Ini artinya Elkington berpendapat berhasilnya sebuah bisnis dalam jangka panjang tidak hanya didasarkan pada ukuran untung atau rugi secara materi, namun juga pada kesejahteraan sekitar masyarakat dan keselamatan serta kesehatan planet bumi ini (Elkington 1997). Dengan Framework ini memberikan landasan yang kuat untuk program pengembangan potensi pariwisata alam yang belum tereksplorasi di Desa Wisata Nglinggo.

Selain itu, framework ini memberikan penekanan pada kompetensi petani dan pelaku wisata dalam mengelola agrowisata dengan baik. Dengan memberikan pelatihan dan dukungan yang diperlukan, mereka dapat mengoptimalkan pengalaman wisatawan dan menciptakan daya tarik yang lebih besar. Penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk upaya konservasi alam dan lingkungan agar Desa Wisata Nglinggo mampu mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan, serta memberikan dampak positif yang dapat dirasakan oleh semua pihak terkait, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan (Nuringsih and Nuryasman 2021). Dengan demikian, framework ini menjadi landasan yang kokoh untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mencapai hasil yang berkelanjutan dalam pengembangan agrowisata di daerah ini melalui regulasi, konservasi, dan kelangsungan hidup (Roxas, Rivera, and Gutierrez 2020). Peningkatan penghasilan dan sumber pendapatan masyarakat lokal namun juga memperkuat konservasi keanekaragaman hayati, artinya membangun dan mengembangkan ekonomi tanpa membebani sumber daya alam (Nguyen 2021).

Implikasi dari framework ini dalam penelitian adalah bahwa penelitian akan lebih terarah dan berfokus pada langkah-langkah yang konkret dalam pengembangan agrowisata berkelanjutan di Desa Wisata Nglinggo. Framework ini memberikan panduan yang jelas mengenai tahapan perencanaan, implementasi, dan evaluasi, serta menggarisbawahi pentingnya melibatkan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, petani, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.

Dengan memahami framework ini, penelitian dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih konkret untuk pemerintah daerah, kelompok petani, dan pelaku wisata dalam upaya meningkatkan tata kelola agrowisata yang berkelanjutan di daerah tersebut. Selain itu, framework ini juga membantu mengidentifikasi potensi konflik kepentingan yang dapat diatasi dengan baik dalam rangka mencapai tujuan pariwisata yang berkelanjutan di Desa Wisata Nglinggo seperti yang diuraikan pada Gambar 2 dibawah ini.



Gambar 1. Research Framework
 Sumber: Olahan Peneliti (2023)

2. METODOLOGI PENELITIAN

Dalam penelitian ini berupaya ingin mengetahui lebih dalam tata kelola stakeholder dalam pengembangan agrowisata perkebunan teh di Desa Wisata Nglinggo, Samigaluh, Yogyakarta. Teori Stakeholder Dynamics, Model Tata Kelola dan pendekatan Triple Bottom Line (TBL) dalam pembangunan berkelanjutan menjadi dasar teori dari penelitian ini, sehingga nantinya dapat mengembangkan sebuah model atau kerangka kerja tata kelola stakeholder yang efektif dalam pengembangan agrowisata yang berkelanjutan sebagai pedoman dalam pembangunan desa wisata.

Peneliti menggunakan metode kualitatif secara deskriptif pada objek penelitian secara natural agar dapat tergambar kompleksitas permasalahan stakeholder berdasarkan informasi terperinci dari sudut pandang para informan dan observasi lingkungan dengan situasi yang alami (Hadi, Asrori, and Rusman 2021), lalu peneliti melakukan interpretasi dan analisis data yang terkumpul terkait peran dan kepentingan stakeholder dalam pengembangan tata kelola agrowisata perkebunan teh di Desa Wisata Nglinggo.

Peneliti mengumpulkan data primer melalui teknik wawancara mendalam kepada informan dan catatan observasi lapangan berdasarkan peran dan kepentingan stakeholder. Dalam pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria

memiliki pengalaman dan berperan aktif dalam pengembangan agrowisata. Informan pertama, Teguh, sebagai kepala dusun Nglinggo dan dikenal sebagai perintis Desa Wisata Nglinggo. Informan kedua, D adalah ketua komunitas pemuda dan pemilik usaha transportasi wisata Nglinggo berusia 40-an tahun. Informan ketiga, E, lulusan SMA berusia 28 tahun sebagai pengelola cafe dan salah satu anggota komunitas pemuda Nglinggo. Informan keempat, T, sebagai ketua kelompok wanita tani dan pelaku usaha wisata kuliner berusia 41 tahun. Informan kelima, T, sebagai pengelola homestay dan anggota pengurus Pokdarwis Nglinggo. Informan keenam, A, selaku staf ahli pemerintah daerah Kulon Progo berusia 45 tahun. Informan ketujuh, S, sebagai ketua kelompok tani kebun teh Nglinggo berusia 65 tahun.

Dalam penelitian ini juga menggunakan metode observasi lapangan untuk melengkapi data primer dari hasil wawancara mendalam (Hadi et al. 2021). Observasi lapangan dilakukan dengan cara merekam menggunakan video dan foto untuk mendeskripsikan lokasi dan situasi wilayah penelitian. Hasil observasi dituangkan bentuk catatan lapangan mempelajari kondisi dan keadaan fisik dan non-fisik yang berhubungan dengan fenomena yang menjadi subjek penelitian. Wawancara dan observasi dilakukan oleh peneliti di Desa Wisata Nglinggo dari tanggal 8 Agustus sampai dengan 13 Agustus 2023.

Sebelum turun ke lapangan, peneliti mengumpulkan data sekunder sebagai data pendukung penelitian melalui studi kepustakaan berbagai dokumen, peraturan, artikel jurnal dan sumber data sekunder lainnya yang terkait dengan desa wisata. Selain itu peneliti melakukan diskusi pendahuluan dengan staf ahli dari Dinas Pariwisata Kulon Progo untuk mendapatkan gambaran awal sejarah, situasi, kondisi dan para pelaku usaha di Desa Wisata Nglinggo.

Untuk analisis data menggunakan metode analisis Strauss & Corbin yaitu *open coding*, *axial coding* dan *selective coding*. Tujuannya untuk mendapat penjelasan yang lebih dalam dan sistematis terhadap fenomena yang diteliti dengan cara dengan mengidentifikasi peran dan kepentingan para stakeholder, lalu melakukan kategorisasi (Hadi et al. 2021). Hal ini disebabkan para informan harus menjawab pertanyaan yang berbeda-beda sesuai dengan peran, kepentingan dan pengalamannya masing-masing dalam pengelolaan Desa Wisata Nglinggo. Untuk olah data menggunakan aplikasi Nvivo 12 berdasarkan tema yang teridentifikasi dan digunakan untuk menyusun kerangka model tata kelola *stakeholder* (*framework*).

3. HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Model tata kelola *stakeholder* dalam pengembangan Desa Wisata Nglinggo yang berkelanjutan dilihat dari sisi peran penting dan keterlibatan masing-masing *stakeholder*, faktor pendukung, identifikasi potensi dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Nglinggo, Samigaluh Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Pada model tata kelola ini dijelaskan sebagai kerangka kerja sesuai arah tanda panah sebagai alur tahapan dalam model pada gambar 2.

3.1 Fase Perencanaan

3.1.1 Tahap 1 Kebijakan Pemerintah Daerah dan Lokal

Para *stakeholder* mengakui bahwa pengembangan desa wisata sangat bergantung dari faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, hukum dan lingkungan yang dapat mendorong atau menghambat pengembangan Desa Wisata Nglinggo. Kebijakan politik dan ekonomi seperti peran pemerintah harus mampu menjamin kepentingan pemilik lahan, kelompok petani, pelaku usaha dan investor melalui regulasi yang adil dan jelas, serta menyusun kebijakan yang

mampu mengintegrasikan semua pihak yang berkepentingan dalam pengembangan pariwisata desa wisata (Putri and Adinia, 2018; Surya et al., 2021; Prasetya and Kushartanti, 2022; Permatasari, 2022). Dari hasil temuan penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang dituangkan dalam regulasi belum mampu mengatur hubungan antara pemilik lahan, kelompok petani kebun teh dan pelaku pariwisata secara kolaboratif, bahkan menimbulkan konflik kepentingan diantara mereka. Proses pembangunan desa wisata selalu diwarnai dengan berbagai bentuk konflik kepentingan para stakeholder (Pemila and Luqman 2022). Menurut informan, konflik horizontal antar *stakeholder* yang terjadi menandakan bahwa pemerintah daerah sendiri belum mampu merumuskan kebijakan yang memiliki visi dan *roadmap* yang jelas dalam pengembangan agrowisata berkelanjutan serta rencana jangka panjang yang mengintegrasikan sektor industri pariwisata dan agribisnis sesuai dengan kondisi masyarakat lokal serta mengakomodir kepentingan pemilik lahan, kelompok tani dan pelaku usaha. Kebijakan pemerintah daerah masih cenderung lebih fokus pada aspek teknis seperti program pendampingan dan pelatihan daripada aspek-aspek strategis dalam pengembangan agrowisata yang menyentuh persoalan mendasar (Arifin and Ardhiansyah, 2020; Iqbal, 2022). Disisi lain masih ada kendala ego-sektoral dalam hal koordinasi antar lembaga pemerintah, seperti yang diutarakan oleh salah satu informan,

”Porsi tugas dari dinas hanya pendampingan dan pelatihan, petani butuh ini ya difasilitasi. Masalahnya roadmap secara strategi harus seperti apa belum sampai kesana. Selain itu belum ada koordinasi antar dinas. Sepertinya belum bisa duduk bersama karena ada ego sektoral. Itu yang susah, kecuali di tingkat top-nya misalnya bupati turun tangan. Karena konsep agrowisata berkelanjutan ini pasti melibatkan banyak sektor dan kepentingan. Kesadaran itu memang harus dimiliki semua pihak yang terlibat.”

Aspek sosial-budaya juga harus menjadi perhatian terutama untuk mendorong partisipasi masyarakat lokal agar dapat mengali potensi daerah dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dimana tidak hanya sektor alam dan komoditas tapi juga sektor sosial budaya untuk didorong menjadi destinasi wisata termasuk dari kelestarian lingkungan alam (Suprihanto, Muhamad, and Nurgraheni 2020). Aspek lingkungan juga merupakan pondasi penting dalam pengembangan agrowisata yang berkelanjutan dalam menjaga kelestarian alam. Untuk itu program-program konservasi dan pelestarian alam oleh pemerintah perlu didukung kebijakan yang memberi arah yang jelaskan dan mampu mengintegrasikan semua sektor dan para pihak yang terlibat dalam agrowisata ini (Iqbal 2022).

Aspek hukum juga perlu menjadi perhatian pemerintah menyangkut regulasi dalam pengelolaan usaha agrowisata seperti masalah perijinan (Fairuza 2017). Salah satu informan menyampaikan hambatan dalam memperoleh perijinan operasional kendaraan transportasi pariwisata, seperti Uji KIR (Uji Kelayakan Kendaraan) bagi armada kendaraan yang digunakan untuk agrowisata. Hal ini dikarenakan spesifikasi dan model kendaraannya yang ada di kawasan Desa Wisata Nglingsgo ini sangat berbeda dengan ketentuan umum bagi kendaraan angkutan umum yang ada. Seharusnya pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam uji KIR untuk spesifikasi kendaraan khusus transportasi umum agrowisata ini atau minimal ada organisasi otomotif resmi yang mewadahi jenis kendaraan tersebut.

Disamping itu para pembuat kebijakan, baik ditingkat pemerintah daerah dan lokal harus menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan agrowisata. Langkah pertama adalah pemerintah perlu memperhatikan berbagai aspek yang dapat mempengaruhi

perkembangan agrowisata tersebut dalam jangka panjang. Untuk itu perlu upaya dalam mendorong komunikasi partisipatif antar lembaga pemerintah daerah dan lokal, serta pengawasan yang efektif terhadap para *stakeholder* yang terlibat agar masalah yang muncul tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan (Ramandhani, 2021; Kusuma, 2018; Oktarina et al. 2022).

3.1.2 Tahap 2 Peran Pemerintah dalam Sektor Pariwisata dan Perkebunan

Pada tahap ini peran pemerintah tingkat daerah hingga lokal sangat penting, karena dapat mempengaruhi perkembangan agrowisata keberlanjutan yang ditopang oleh industri pariwisata dan budidaya perkebunan teh di Desa Wisata Nglinggo, khususnya dalam hal merespon dan mengatasi isu-isu strategi dan konflik kepentingan yang terjadi diantara para petani, pelaku usaha, pemilik lahan dan investor. Berdasarkan hasil temuan lapangan, pengelolaan agrowisata pada Desa Wisata Nglinggo belum terintegrasi secara utuh dan masih bersifat parsial, terutama antara kelompok tani kebun teh dan pelaku wisata, artinya mereka masih berjalan sendiri-sendiri dan belum ada upaya kolaborasi yang saling menguntungkan antar kedua belah pihak. Dari pihak kelompok petani kebun teh merasa hanya dimanfaatkan sebagai objek dan tidak ada kontribusi yang positif dari kehadiran para wisatawan di daerah tersebut, maupun kompensasi kepada petani kebun teh atas kerugian yang ditimbulkan akibat dampak pariwisata seperti polusi kendaraan wisata dan kerusakan lahan perkebunan dan tanaman teh akibat kehadiran wisatawan tersebut. Menurut informan, permasalahan ini sudah pernah disampaikan ke pemerintah daerah untuk dicarikan solusinya, namun tidak pernah terselesaikan dengan baik. Pihak pemerintah dipandang belum mampu mengatasi dan menyelesaikan konflik kepentingan yang terjadi, serta belum adanya regulasi yang jelas dalam mengatur dan mengatasi hal tersebut.

Selain itu pemerintah daerah juga harus mampu mengidentifikasi potensi-potensi yang dapat dikembangkan dari sektor agrowisata secara inovatif, dengan mengacu pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan alam agar pengembangan wilayah berdampak positif secara jangka. Untuk itu perlu upaya peran aktif pemerintah daerah dalam melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan cara mengadopsi strategi partisipatif dan komunikasi yang efektif dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengambil keputusan dalam menyusun rencana pembangunan berkelanjutan tersebut, serta memberi ruang resolusi konflik kepentingan antar para *stakeholder* (Oktarina, S. Sumardjo, et al., 2022; Notonegoro, 2020; Sudirman, 2020). Temuan dalam penelitian ini terlihat para petani, pelaku usaha dan pemilik lahan memiliki peran besar dalam mendorong pengembangan agrowisata Desa Wisata Nglinggo. Mereka sendiri telah menyadari untuk melakukan diversifikasi usaha pertanian konvensional ke sektor agrowisata. Namun selain faktor kesadaran, faktor kesediaan dan kemauan pemilik lahan dan kelompok petani menjadi hal penting. Faktor ini harus menjadi perhatian seluruh para *stakeholder* dan pembuat kebijakan untuk meminimalisir dampak negatif yang muncul dalam pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.

3.1.3 Tahap 3 Lahan Perkebunan Sebagai Keunggulan Kompetitif

Pada tahap ini yang menjadi titik fokus pada lahan perkebunan yang merupakan elemen penting dalam agrowisata di Desa Wisata Nglinggo. Hal ini menjadi modal utama sebagai keunggulan kompetitif usaha agrowisata yang perlu dieksplorasi menjadi komoditi inovatif yang dapat dipasarkan kepada para wisatawan. Seperti paket wisata edukasi perkebunan untuk meningkatkan pengalaman wisatawan, serta ketersediaan alam pendukung seperti gunung,

sungai, hutan dan sumber daya alam lainnya yang dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pengembangan agrowisata, namun tetap memperhatikan konservasi dan kelestarian alam selain kultur warga lokal dan iklim di wilayah Desa Wisata Nglingsgo, seperti yang disampaikan oleh salah satu informan,

”Awalnya kami disini adalah petani tradisional yang hanya menanam tanaman musiman seperti jagung dan singkong. Tahun 1990-an melalui Dinas Perkebunan dan Kehutanan waktu itu ada program penanaman tanaman teh untuk alih fungsi lahan yang bertujuan untuk konservasi alam, karena lahan di wilayah Nglingsgo ini cukup tajam kemiringan lahan tanahnya diatas 45 derajat sehingga kalau dibiarkan seperti itu akan menyebabkan longsor dan erosi. Nah setelah ditanami teh, selang sekitar 10 tahun kemudian, tanaman teh tersebut terus berkembang dan orang-orang dari luar dusun datang ke sini untuk melihat tanaman teh itu sambil menikmati alam sekitarnya. Dari situ mulai kami kembangkan paket-paket wisata dan edukasi seperti pengolahan teh dan kopi, pembuatan gula aren dan kolang kaling, dan terakhir kami buat paket pengolahan susu kambing”

Masyarakat lokal telah menyadari potensi keunggulan kompetitif yang mereka miliki, namun kesadaran itu tidak cukup harus ada upaya dan kemampuan mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan, selain penyediaan infrastruktur dan sarana pendukung lainnya, seperti perbaikan jalan, *homestay*, restoran, armada transportasi dan aktivitas pemasaran agrowisata melalui media sosial dan aplikasi digital yang dapat berkontribusi sangat penting dalam mengangkat keunggulan kompetitif usaha agrowisata tersebut (Baipai et al. 2023). Hal yang paling mendasar adalah semangat wirausaha dalam membentuk kompetensi yang mampu menjalankan usahanya secara jangka panjang (Alexander and Layman 2021).

3.1.4 Tahap 4 Kompetensi Petani dan Pelaku Wisata

Tahap ini fokus pada mengidentifikasi kompetensi kelompok petani dan pelaku usaha wisata dalam perencanaan yang berkelanjutan sebagai bagian model efektivitas tata kelola *stakeholder* dalam pengembangan agrowisata di Desa Wisata Nglingsgo. Kompetensi petani dan pelaku usaha wisata perlu digali lebih jauh, terutama terkait dengan keahlian dan ketrampilan yang mereka miliki saat ini dengan kompetensi keahlian dan keterampilan yang harus mereka miliki untuk pengembangan agrowisata berkelanjutan (Oktarina, Sumardjo, et al. 2022). Hal ini didasari bahwa kompetensi yang dibutuhkan kelompok petani dan pelaku wisata yang akan melakukan diversifikasi usaha ke sektor pariwisata akan sangat berbeda dari mereka yang berasal dari pertanian yang konvensional. Untuk itu diperlukan sebuah program pelatihan dan pendampingan yang dirancang untuk kebutuhan dan peningkatan kompetensi yang baru bagi kelompok petani dan pelaku wisata dalam pengembangan agrowisata, khususnya yang berbasis pada pariwisata berkelanjutan yang tidak hanya mementingkan aspek ekonomi, namun juga aspek sosial budaya dan kelestarian lingkungan alam sekitarnya (Baipai et al. 2023). Hal ini sangat penting, karena selain peningkatan ketrampilan dan keahlian namun juga merubah persepsi melalui pola pikir mereka yang lebih inovatif. Selain kompetensi wirausaha lainnya seperti pengelolaan keuangan, SDM, pelayanan pelanggan, promosi dan pemasaran serta kemampuan bahasa asing dalam berkomunikasi dengan para wisatawan, khususnya dari manca negara.

3.2 Fase Pengembangan

3.2.1 Tahap 1 Pengembangan Kebijakan

Pada fase ini peran pemerintah daerah cukup penting dalam pengembangan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan yang berbasis agrowisata, karena posisi pemerintah daerah berada pada struktur paling atas terkait dalam pembuat kebijakan wilayahnya. Pemerintah harus memiliki kerangka kerja, *roadmap* dan arah kebijakan berbasis prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan yang jelas dan menyeluruh dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk mendukung pengembangan agrowisata yang berkelanjutan desa wisata (Roxas et al. 2020). Titik perhatian pada kepentingan para *stakeholder* yang terlibat, termasuk dalam hal ini kerjasama dan koordinasi antar kantor dinas pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakannya, serta peran pengawasan yang profesional agar tercipta manfaat dan keberlangsungan usaha bagi pelaku wisata, petani kebun teh, masyarakat lokal dan program pelestarian alam dengan memperhatikan budaya lokal, kondisi alam dan geografi wilayah. Selain itu peran pemerintah daerah perlu memperhatikan peluang dan tantangan apa saja yang muncul dalam menerapkan kebijakan tersebut (Wihastuti and Oktavia 2022).

3.2.2 Tahap 2 Pengembangan dalam Pendekatan *Multi-Stakeholder*

Pemerintah dalam hal ini kementerian pariwisata, kementerian pertanian dan kementerian lain hingga ke pemerintah daerah yang bertanggungjawab dalam program pengembangan agrowisata yang berkelanjutan harus satu suara dan satu visi. Para *stakeholder* yang terlibat dalam pengembangan ini perlu didorong untuk membentuk lembaga konsultasi dan koordinasi sebagai wujud dari pendekatan *multi-stakeholder* (Eshun and Mensah 2020). Fungsinya *pertama*, sebagai jembatan antar *stakeholder* dalam mengembangkan program tersebut agar mereka memiliki persepsi dan visi bersama para *stakeholder* melalui strategi adaptasi dan inovasi. *Kedua*, sebagai lembaga komunikasi yang diharapkan mampu mendorong tingkat partisipatif antar instansi pemerintah dan para *stakeholder*. *Ketiga*, lembaga monitoring kepatuhan para *stakeholder* berdasarkan prinsip-prinsip agrowisata yang berkelanjutan, selain untuk mengatasi konflik kepentingan antara para *stakeholder* sebagai sebuah resolusi.

3.2.3 Tahap 3 Strategi Diversifikasi Usaha Perkebunan

Tahap ini fokus pada upaya mengadopsi inovasi-inovasi dalam pengembangan produk dan jasa layanan pariwisata yang dibutuhkan pada sektor agrowisata. Langkah strategi diversifikasi usaha perkebunan yang perlu dilakukan adalah hal pertama terkait kesepakatan dan komitmen dari seluruh para *stakeholder* yang terlibat (Vera 2009). Setelah mereka diberikan informasi yang memadai tentang manfaat dari diversifikasi usaha agrowisata, selanjutnya upaya pengembangan diversifikasi usaha dalam bentuk paket wisata, edukasi wisata dan atraksi budaya, seperti yang diutarakan oleh salah satu informan,

"Lahan di sini hanya perkebunan, ya metode kami menawarkan paket-paket edukasi wisata. Edukasi pembuatan teh dari petik sampai jadi teh sangrai. Lalu ada paket proses pengambilan nira dari pohon aren sampai menjadi gula aren sama kolang kaling. Ada juga paket pembuatan kopi. Lalu di sini juga ada kesenian namanya Tari Lengger Tapeng. Keberadaan kesenian Lengger Tapeng di sini memang sudah cukup lama, inilah kita sodorkan juga ke wisatawan dari sisi atraksi kebudayaan. Terus akhir-akhir ini juga kami tambah dengan susu kambing, mengingat warga disini banyak yang memelihara kambing jadilah sebuah paket edukasi wisata. Setelah itu

lah, orang kampung sini baru pada sadar, ternyata kegiatan yang kami lakukan sehari-hari ini sebagai petani, yang bagi kami hal biasa, bagi orang lain ternyata menjadi sesuatu yang berbeda dan menjadi sumber pendapatan tambahan buat warga disini.”

Selain melakukan inovasi melalui paket wisata, hal yang perlu diperhatikan adalah penyediaan infrastruktur dan sarana sebagai penunjang dan pendukung strategi diversifikasi usaha seperti penyediaan homestay, rumah makan, transportasi, akses jalan dan akomodasi sebagai bagian penting yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam menjalankan strategi ini.

3.2.4 Tahap 4 Pengembangan Usaha Agrowisata

Pengembangan melalui program pendampingan dan pelatihan bagi petani dan pelaku usaha oleh pemerintah daerah dan pihak terkait dengan membekali mereka dengan ketrampilan dan keahlian kewirausahaan di bidang pariwisata. Karena kurangnya ketrampilan, minimnya informasi dan pengetahuan terkait tentang usaha agrowisata yang digelutinya akan berpengaruh pada tingkat kehadiran para wisatawan (Parlindungan 2021). Temuan penelitian menunjukkan bahwa peningkatan ketrampilan para petani dan pelaku usaha dalam hal pelayanan pelanggan, kebersihan, keramahan-tamahan dan kenyamanan pengunjung akan mempengaruhi kinerja usaha agrowisata, seperti yang dipaparkan oleh salah satu informan,

”Kami selalu mengingatkan ke warga kami disini, bahwa pelayanan yang pertama adalah ramah tamah dan kebersihan. Artinya memang Sapta Pesona harus kita terapkan betul-betul disini. Dan sisi ramah tamah dan kebersihan itu yang utama agar pengunjung yang datang kesini merasa nyaman. Karena kalau sudah tidak ramah tamah, orang pasti sudah tidak mau datang lagi, jadi nggak suka lagi. Akhirnya dengan kondisi itu warga masyarakat yang terlibat mulai ada titik kesadaran. Selain itu untuk kebersihan, setiap minggu warga disini pasti kerja bakti. Paling nggak menyapu halaman masing-masing dan menyapu jalan utama.”

Aspek pengembangan sarana penginapan juga menjadi perhatian para warga sekitar setelah makin banyak wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Nglinggo. Dampaknya kreatifitas pelaku usaha mulai tumbuh dengan menyediakan sarana penginapan dalam bentuk *homestay* bagi wisatawan yang ingin menginap. Selain itu mendorong masyarakat lokal untuk berinovasi salah satunya penyediaan kendaraan transportasi dengan merubah mobil biasa menjadi mobil jeep dan *mobil shuttle* (odong-odong) sebagai armada transportasi para pengunjung ke lokasi objek wisata yang ada di kawasan Desa Wisata Nglinggo.

3.3 Fase Implementasi

3.3.1 Tahap 1 Penerapan Kebijakan

Iklim yang kondusif dan mendukung akan memudahkan dalam penerapan kebijakan, seperti menyusun peraturan petunjuk pelaksana yang jelas, pengawasan dan pemantauan dalam penerapan kebijakan tersebut serta peran komunikasi publik yang efektif dengan menjunjung tinggi pada prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan. Perlu ada upaya dari pemerintah pusat hingga daerah untuk melakukan pendekatan multi-sektoral yang mendorong keterlibatan dari berbagai pihak lain (*multi-stakeholder*) seperti akademisi, media massa, asosiasi, para ahli dan sebagainya untuk mendukung pengembangan agrowisata yang berkelanjutan (Widiawaty, Pramulatsih, and Pebriani 2018). Tantangan dan hambatan yang

dihadapi adalah pertentangan dan konflik kepentingan antara para *stakeholder* sebagai dampak dari pengembangan tersebut yang perlu dicari solusinya untuk mengatasinya. Untuk mengatasi hal tersebut adalah lembaga komunikasi dan koordinasi dengan pendekatan organisatoris yang difasilitasi oleh lembaga pemerintah dengan melibatkan para ahli dibidang pengembangan perkebunan dan pariwisata serta pihak-pihak yang terkait (Iqbal 2022).

3.3.2 Tahap 2 Keterlibatan Berbagai Stakeholder (Multi-Stakeholder)

Dibutuhkan peran pemerintah dalam menerapkan pendekatan *multi-stakeholder* dari berbagai *stakeholder* yang mengarah dalam bentuk kerjasama dan koordinasi untuk memfasilitasi pengembangan agrowisata yang berkelanjutan. Pemerintah harus konsisten dalam mengawasi penerapan kebijakan, menindak tegas para *stakeholder* yang melanggar peraturan, mengatasi konflik antar *stakeholder* yang muncul dan mengelola akses informasi ke berbagai pihak yang berkepentingan. Penyampaian informasi mengenai kebijakan dan proses implementasi melalui sosialisasi yang jelas dan transparan secara lintas sektoral. Selain itu menyerap berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat lokal yang berperan penting memberikan informasi tentang dampak yang muncul dari kegiatan usaha agrowisata tersebut. Proses tersebut harus didukung melalui komunikasi partisipatif yang dilakukan secara berkala dengan semua *stakeholder*, disertai pemantauan atau pengawasan dari penerapan kebijakan tersebut, termasuk kerjasama dan koordinasi dengan semua elemen masyarakat yang terlibat dalam usaha agrowisata (Dewi 2018).

3.3.3 Tahap 3 Agrowisata Berbasis Perkebunan

Tahap ini melibatkan implementasi strategi diversifikasi usaha perkebunan yaitu pengembangan agrowisata berbasis perkebunan melalui komunikasi partisipatif, koordinasi, konsultasi serta kesepakatan diantara para *stakeholder* yang terlibat dalam mengambil keputusan. Pengembangan agrowisata harus sesuai dengan tiga pilar pembangunan berkelanjutan yaitu faktor ekonomi, sosial dan lingkungan. Para *stakeholder* yang terlibat harus tahu dan mematuhi terhadap prinsip-prinsip keberlanjutan dalam hal konservasi alam dan lingkungan perkebunan dalam pengelolaan sumber daya selama proses pengembangan agrowisata yang berkelanjutan.

3.3.4 Tahap 4 Pengelola Agrowisata

Pada tahap ini diharapkan para *stakeholder* yang terlibat dapat memahami dan menerapkan keahlian dalam pengelolaan agrowisata berbasis perkebunan melalui ketrampilan hospitality dan kewirausahaan dengan berpegang pada kepatuhan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.4 Fase Hasil

Pada tahap ini dari penerapan kebijakan prinsip berkelanjutan berbasis perkebunan, keterlibatan para pihak yang berkepentingan dengan pendekatan *multi-stakeholder* kerjasama, koordinasi, komunikasi dan sosialisasi kebijakan dalam mendukung pengembangan dan pengelolaan agrowisata berkelanjutan berbasis perkebunan, pada akhirnya diharapkan dapat menciptakan konservasi keragaman hayati dan peningkatan kualitas lingkungan lahan perkebunan secara jangka panjang. Proses ini harus dilakukan melalui komunikasi partisipatif untuk memastikan suara dan permasalahan dari masyarakat lokal dapat terdengar dan peran pemerintah dalam memantau dan mengawasi selama penerapan kebijakan tersebut perlu dilakukan secara konsisten.

Wujud hasil dari program ini adalah menciptakan jaringan kolaborasi dan integrasi antara para pelaku, pengembangan sumber daya alam serta potensi dari agribisnis dan pariwisata dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui inovasi produk dan layanan pariwisata pada lingkungan perkebunan berbasis konservasi alam untuk menciptakan kelestarian lingkungan sebagai dimensi lingkungan, pembangunan sosial melalui pemberdayaan dan partisipasi masyarakat sebagai dimensi sosial, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan nilai tambah ekonomi masyarakat lokal sebagai dimensi ekonomi, sehingga melahirkan kehidupan masyarakat yang lebih baik selaras dengan lingkungan alam sekitar.

4. KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah disajikan menggambarkan pentingnya pengembangan model tata kelola agrowisata yang efektif secara holistik dan berkelanjutan. Dalam rangka mencapai kesuksesan dalam agrowisata, empat aspek utama perlu diperhatikan dengan cermat. *Pertama*, keterlibatan masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan dan pengembangan program agrowisata berkelanjutan merupakan fondasi yang kuat untuk memastikan program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat. Ini juga dapat meningkatkan partisipasi dan dukungan dari masyarakat lokal, yang sangat penting untuk keberlanjutan program tersebut. *Kedua*, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan harus menjadi perhatian utama, mengingat dampak signifikan yang dapat ditimbulkan oleh sektor pertanian dan perkebunan terhadap lingkungan. Penggunaan teknologi ramah lingkungan dan komitmen pada prinsip-prinsip konservasi menjadi hal yang sangat penting. *Ketiga*, peningkatan kualitas produk dan layanan agrowisata serta perhatian terhadap keamanan dan kenyamanan wisatawan merupakan faktor penentu dalam menarik wisatawan. *Keempat*, promosi yang efektif dan aksesibilitas yang baik melalui teknologi informasi dan transportasi yang mudah harus diintegrasikan dalam upaya memperluas daya tarik agrowisata.

4.2. Implikasi/Batasan dan Saran untuk Penelitian Selanjutnya

Selain itu, agrowisata sebagai bentuk alternatif dari pariwisata konvensional menawarkan peluang yang unik. Wisatawan dapat terlibat langsung dalam kegiatan pertanian atau perkebunan, memungkinkan mereka untuk memahami lebih dalam proses produksi makanan dan pentingnya konservasi lingkungan melalui kegiatan edukasi wisata. Agrowisata juga memberikan kesempatan kepada petani untuk mendapatkan penghasilan tambahan dan lapangan kerja baru, serta mendorong pengembangan wilayah pedesaan. Namun, perlu diingat bahwa agrowisata juga menghadapi tantangan, seperti investasi besar dalam infrastruktur dan manajemen yang cermat untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan wisatawan, serta dampak lingkungan yang harus dikelola secara berkelanjutan.

Terakhir, teori *stakeholder dynamics* menjadi penting dalam konteks pengembangan agrowisata. Mengidentifikasi, mengelola, dan mengukur pengaruh stakeholder yang beragam dalam program agrowisata adalah langkah kunci untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan program tersebut. Pengelolaan *stakeholder* yang baik dapat meningkatkan dukungan masyarakat, mengurangi risiko konflik, dan memastikan bahwa kepentingan semua pihak terpenuhi dengan transparan dan partisipatif. Keseluruhan, hasil penelitian ini menyediakan model tata kelola sebagai dasar yang kuat untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengembangan agrowisata yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat lokal dan lingkungan alam.

Meskipun penelitian ini memberikan gambaran yang komprehensif mengenai model tata kelola stakeholder dalam pengembangan Desa Wisata Nglinggo yang berkelanjutan, terdapat beberapa limitasi yang perlu diperhatikan. Pertama, penelitian ini bersifat deskriptif dan kualitatif, sehingga generalisasi hasil mungkin terbatas pada konteks Desa Wisata Nglinggo dan tidak dapat secara langsung diterapkan pada wilayah lain. Kedua, wawancara dan observasi sebagai metode pengumpulan data dapat mencerminkan perspektif terbatas dari responden dan peneliti, serta kemungkinan adanya bias dalam interpretasi data.

Selain itu, faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi atau dikontrol sepenuhnya, seperti perubahan kebijakan pemerintah atau kondisi ekonomi global, dapat mempengaruhi implementasi model tata kelola stakeholder ini. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu diinterpretasikan dengan mempertimbangkan konteks khusus Desa Wisata Nglinggo dan perlu diperhatikan dalam menggeneralisasi temuan ini ke konteks lain yang lebih luas.

5. REFERENSI

- Alexander, W., & Layman, C. V. (2021). FLOW EXPERIENCE DAN ENTREPRENEURIAL SATISFACTION DALAM BISNIS BERKELANJUTAN DI INDONESIA ERA COVID19. *Ultima Management: Jurnal Ilmu Manajemen*, 13(2), 242-255.
- Ammirato, S., Felicetti, A. M., Raso, C., Pansera, B. A., & Violi, A. (2020). Agritourism and sustainability: What we can learn from a systematic literature review. *Sustainability*, 12(22), 9575.
- Arifin, P., & Ardiansyah, N. N. (2020). Penerapan Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Yogyakarta. *Jurnal Nomosleca*, 6(1).
- Astono, A. D., & Herwin, H. (2021). Identification of The Characteristics of Menoreh Coffee and Cocoa Potential and Its Contribution to Tourism. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 4(1), 131-142.
- Baipai, R., Chikuta, O., Gandiwa, E., & Mutanga, C. N. (2023). A framework for sustainable agritourism development in Zimbabwe. *Cogent Social Sciences*, 9(1), 2201025.
- Blanco-Mesa, F., Gil-Lafuente, A. M., & Merigó, J. M. (2018). Subjective stakeholder dynamics relationships treatment: a methodological approach using fuzzy decision-making. *Computational and Mathematical Organization Theory*, 24, 441-472.
- Ciolac, R., Adamov, T., Iancu, T., Popescu, G., Lile, R., Rujescu, C., & Marin, D. (2019). Agritourism-A Sustainable development factor for improving the 'health' of rural settlements. Case study Apuseni mountains area. *Sustainability*, 11(5), 1467.
- Dewi, H. K. (2018). *Analisis Komunikasi Partisipatoris pada Kelompok Masyarakat Kampung Ekologi Temas* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Eden, C., & Ackermann, F. (2021). Modelling stakeholder dynamics for supporting group decision and negotiation: theory to practice. *Group Decision and Negotiation*, 30(5), 1001-1025.
- Elkington, J. (1997). The triple bottom line. *Environmental management: Readings and cases*, 2, 49-66.
- Eshun, G., & Mensah, K. (2020). Agrotourism niche-market in Ghana: a multi-stakeholder approach. *African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure*, 9(3), 319-334

- Fairuza, M. (2017). Kolaborasi antar stakeholder dalam pembangunan inklusif pada sektor pariwisata (studi kasus wisata Pulau Merah di Kabupaten Banyuwangi). *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 5(3), 1-13.
- Freeman, R. E. (2015). Stakeholder theory. *Wiley encyclopedia of management*, 1-6.
- Hadi, A. & Rusman, R. (2021). *Penelitian kualitatif studi fenomenologi, case study, grounded theory, etnografi, biografi*. CV. Pena Persada.
- Iqbal, M. (2022). PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA MELALUI KONSEP COMMUNITY BASED TOURISM DAN SUSTAINABLE TOURISM. *AT TAMKIN: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 2(1), 09-27.
- JANAR, K. Y. T. (2023). *KOLABORASI PEMERINTAH KALURAHAN DAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN OBJEK WISATA KEBUN TEH NGLINGGO* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD" APMD").
- Kusuma, V. A. (2018). *Komunikasi Partisipatif dalam Community Based Tourism Sebagai Upaya Menciptakan Masyarakat Sadar Wisata (Studi Deskriptif pada Desa Wisata Joho, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Mahmoodi, M., Roman, M., & Prus, P. (2022). Features and challenges of agritourism: Evidence from Iran and Poland. *Sustainability*, 14(8), 4555.
- Mansor, N., Rashid, K. M., Mohamad, Z., & Abdullah, Z. (2015). Agro tourism potential in Malaysia. *International Academic Research Journal of Business and Technology*, 1(2), 37-44.
- Marais, M., Du Plessis, E., & Saayman, M. (2017). Critical success factors of a business tourism destination: Supply side analysis. *Acta Commercii*, 17(1), 1-12.
- Maulana, Arief. 2021. "Bale Tatanen Padjadjaran, Pusat Pengembangan Hidroponik Modern Berbasis Riset Dan Teknologi."
- Nguyen, V. H. (2021). *Kinh and ethnic minority stakeholder perspectives of tourism development in Sapa, Vietnam* (Doctoral dissertation, Murdoch University).
- Nidar, S. R., Sutisna, S., & Firmansyah, E. A. (2018). Kunjungan Wisatawan dan Bisnis Kuliner di Kota Bandung. *Ultima Management: Jurnal Ilmu Manajemen*, 10(1), 52-64.
- Notonegoro, M. R. (2020). Tahapan Komunikasi Partisipatif Dalam Proses Pengelolaan Wisata Underwater Desa Bangsring (Kecamatan Wongsorejo, Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 4(6), 767-780.
- Nuringsih, K., & Nuryasman, M. N. (2021). The role of green entrepreneurship in understanding Indonesia economy development sustainability among young adults. *Studies of Applied Economics*, 39(12).
- Oktadiani, D. (2022). Partisipasi Pokdarwis dan Isu Komunikasi Stakeholder: Studi Kasus dalam Pembangunan Desa Wisata Berbasis Pertanian. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 6(3), 985-993.
- Oktarina, S., Purnaningsih, N., & Hapsari, D.R. (2022). Komunikasi Partisipatif Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemberdayaan Perempuan Petani Dalam Program Urban Farming Di Kota Bogor Dan Kabupaten Bogor. *Nyimak, Jurnal Komunikasi* 06(01), 1–16.

- Oktarina, S., Sumardjo, S., Purnaningsih, N., & Hapsari, D. R. (2022). Participatory Communication and Affecting Factors on Empowering Women Farmers in The Urban Farming Program at Bogor City and Bogor Regency. *Nyimak: Journal of Communication*, 6(1), 77-93.
- Pakpahan, R. (2018). Implementasi prinsip pariwisata berbasis komunitas di Desa Wisata Nglingsgo Yogyakarta. *JUMPA*, 5(1), 129-146.
- Parlindungan, Davis Roganda. 2021a. "Pelatihan Komunikasi Pemasaran Dalam Merancang Program Promosi Wisata Di Kabupaten Belitung Timur." *ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* VOL. 2(1):1-3.
- Parlindungan, D. R. (2021). Pelatihan Komunikasi Pemasaran Dalam Merancang Program Promosi Wisata Di Kabupaten Belitung Timur. *ABDIMAS Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 1-1.
- Pemila, O. R., & Luqman, Y. (2022). MANAJEMEN KONFLIK KOMUNIKASI DALAM PROSES PEMBANGUNAN WISATA DI DUSUN THEKELAN. *Interaksi Online*, 10(3), 683-698.
- Permatasari, I. (2022). Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) di Bali. *Kertha Wicaksana*, 16(2), 164-171.
- Praničević, D. G., & Peterlin, J. (2015, April). Communication with the stakeholders in sustainable tourism. In *Proceedings of the 3rd International Scientific Conference Tourism in Southern and Eastern Europe 2015 (ToSEE)* (pp. 63-74).
- Prasetya, A., & Kushartanti, B. W. (2022). Pemetaan potensi sport tourism di kabupaten Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Pedagogi Olahraga dan Kesehatan*, 3(1), 1-11.
- Putri, F.A. & Adinia, N.C N (2018). Peran Komunikasi Dalam Berkelanjutan Pengembangan Pariwisata : Studi Kasus Tentang Wisata Berbasis Masyarakat (Pokdarwis) Di Desa Nglanggeran. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 7(2),153-161.
- RAMANDHANI, T. (2021). *ANALISIS KOMUNIKASI PARTISIPATIF DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA SINDORO TLAHAB "DEWI SINTA" DI KABUPATEN TEMANGGUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).
- Rimapradesi, Y. (2022). Strategi Smart Tourism Pemerintah DI Yogyakarta di Era New Normal. *Sospol: Jurnal Sosial Politik*, 8(1), 16-27.
- Roth, M. & Ochterski, J. (2016). Getting started in agritourism. *Cornell Cooperative Extension*.
- Roxas, F. M. Y., Rivera, J. P. R., & Gutierrez, E. L. M. (2020). Mapping stakeholders' roles in governing sustainable tourism destinations. *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 45, 387-398.
- Sebua, D.J & Rusiana. D.A (July, 2023). *Kebun Teh Nglingsgo, Dulu Berjaya, Kini Tak Lagi Menggembirakan*. Kompas. https://yogyakarta.kompas.com/read/2023/07/30/231927378/kebun-teh-nglingsgo-dulu-berjaya-kini-tak-lagi-menggembirakan?page=all#google_vignette
- Dewi, M. (2020). Peran Aktor-Aktor Dalam Komunikasi Partisipatif Pengembangan Destinasi Pariwisata Rammang-Rammang Sulawesi Selatan. Universitas Islam Indonesia.
- Suprihanto, J., Muhamad, M., & Nugraheni, A. I. P. (2020). POTENSI PROSES TRANSFORMASI SOSIAL DALAM UPAYA MENUMBUH-KEMBANGKAN

WISATAWAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENINGKATKAN WISATA BERKELANJUTAN DI DESA WISATA NGLINGGO, SAMIGALUH, KULON PROGO.” Pp. 1–18 in *Seminar Nasional dan Call For Paper : Paradigma Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era 4.0*. STIE Widya Wiwaha, Yogyakarta.

- Surya, I., Nofrima, S., Saputra, H. A., & Nurmiyati, N. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Wisata Berkelanjutan di Kabupaten Kulon Progo (Studi Kasus: Wisata Kebun Teh Nglingsgo). *AL IMARAH: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(2), 190-199..
- Swastika, I. P. D., Budhi, M. S., & Dewi, M. U. (2017). Analisis pengembangan agrowisata untuk kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Petang, Kabupaten Badung. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(12), 4103-4136.
- Tanralili, A. G. (2019). Konsep Pengembangan Agrowisata Pada Kawasan Agropolitan Di Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. *Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Yusnita, V. (2019). Pengembangan pariwisata berbasis agrowisata melalui penguatan peran kelompok wanita tani (Studi di Desa Sungai Langka Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11(1), 252–71.
- Widiawaty, M. A., Pramulatsih, G. P., & Pebriani, V. (2019). Jaringan transportasi dan pengembangan destinasi pariwisata di Kota Cirebon. in *Travel Industry Student Forum : The Driving Force in Travel and Tourism Industry*. Bandung: Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung.
- Wihastuti, L., & Oktavia, R. (2021). Masterplan Pengembangan Desa Wisata Gerbosari Kecamatan Samigaluh Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat*, 4(1), 1-8.
- Windia, W., Wiratha, M., Suamba, K., & Sarjana, M. (2007). Model Pengembangan Agrowisata di Bali. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 7(1), 43979.